

2021

**LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(LKIP)
BADAN PEMBINAAN BUMD
PROVINSI DKI JAKARTA**

**BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

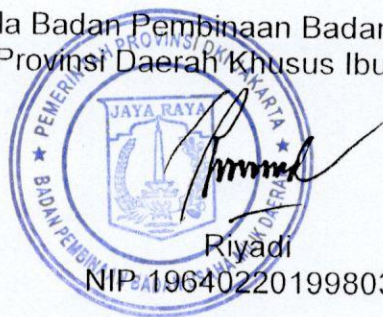
LKIP merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pembinaan BUMD dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Tahun 2021 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memuat informasi tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sehingga dapat selesai tepat waktu.

Jakarta, Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Riyadi

NIP. 196402201998031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	15
3.2 Realisasi Keuangan Tahun 2021	30
BAB IV PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.a	Target Indikator Sasaran Strategis	13
Tabel 2.2.b	Target Indikator Sasaran Strategis (Kegiatan Strategis Daerah)	13
Tabel 2.2.c	Target Indikator Sasaran Khusus	14
Tabel 2.2.d	Target Indikator Sasaran Operasional	14
Tabel 2.2.e	Anggaran Badan Pembinaan BUMD Tahun 2021	14
Tabel 3.1.a	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis	16
Tabel 3.1.b	Data Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2021	17
Tabel 3.1.c	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSD)	19
Tabel 3.1.d	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Khusus	20
Tabel 3.1.e	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Operasional	20
Tabel 3.1.f	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
Tabel 3.1.g	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Khusus	22
Tabel 3.1.h	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Operasional	22
Tabel 3.1.i	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
Tabel 3.1.j	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	24

Tabel 3.1.k	Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran	25
Tabel 3.2.a	Realisasi Penyerapan Anggaran	31
Tabel 3.2.b	Realisasi Penyerapan Anggaran per Program	32
Tabel 3.2.c	Realisasi Penyerapan Anggaran per Kegiatan dan Sub Keigatan	32
Tabel 3.2.b	Realisasi Penyerapan Anggaran per Program	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai bentuk aplikasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat dua indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Dua indikator kunci tersebut adalah realisasi investasi dan Presentasi BUMD yang masuk dalam kategori sehat. Adapun rata-rata pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 95% atau masuk dalam kategori berhasil.

Adapun capaian rencana kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta sampai akhir tahun 2021 dapat dilihat tabel di bawah ini.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	94	98,59	104,88
2	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	77	67	87,01
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	95,42	104,85
4	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (nomor 10)	%	100	100	100%
5	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	%	100	100	100%
6	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	%	100	100	100%
7	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	%	100	100	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	%	100	100	100%
9	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	%	100	100	100%
10	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	%	100	100	100%
11	Persentase capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	%	100	100	100%
12	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	%	100	100	100%
13	Persentase Pemanfaatan E-Order	%	100	100	100%
14	Persentase Pemanfaatan E-Order oleh BUMD	%	50	71,6	143,2%
15	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
16	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	%	100	100	100%
17	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	Nilai	81	90,41	111,62
18	Nilai PMPRB	Nilai	92	89,81	97,61%
19	Prosentase penyerapan anggaran PEN yang diberikan kepada BUMD	%	100	100	100
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100%
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	100	100	100%

Dari data diatas, jumlah indikator kinerja sasaran yang memiliki capaian lebih besar atau sama dengan 100% adalah sebanyak 20 indikator atau 91%, sedangkan yang realisasnya dibawah 100% adalah sebanyak 2 indikator atau 9%.

Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp.23.060.887.584,- dengan penyerapan sebesar Rp.20.855.081.396,- atau 90,43%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp.20.179.582.324,- dengan penyerapan sebesar Rp.18.279.415.939,- atau 90,58% dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.881.305.260,- dengan penyerapan sebesar Rp.2.575.665.457,- atau 89,39%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja BP BUMD tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi pemerintah. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, laporan kinerja dipergunakan sebagai:

1. Sarana/instrument penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen kerja secara taat asas;
3. Cara dan sarana yang efektif untuk kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan dari setiap pimpinan instansi kerja dalam menjalankan misi tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program, kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja

5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan public, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dan hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjadikan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020; dan
4. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

1.3. Dasar Hukum

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Nomor 137/DPPA/2021 tanggal 15 November 2021, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki program kerja yang terbagi atas Program Utama dan Program Kesekretariatan sesuai dengan struktur tugas dan fungsi masing-masing. Adapun Dasar Hukum dari Tupoksi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Kelembagaan :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

b. Dasar Hukum Ketentuan Pelaksanaan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021; dan

7. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta;

- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- f. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan lintas sektor BUMD dan Perusahaan Patungan;
- g. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia BUMD;
- h. pelaksanaan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
- i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- j. pelaksanaan pendirian, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dan/ atau Perusahaan Patungan;
- k. pelaksanaan penguatan daya saing dan sinergi BUMD;
- l. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD;
- m. pelaksanaan pengalihan aset tetap BUMD;
- n. pelaksanaan pengelolaan kerja sama BUMD;
- o. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
- p. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal BUMD;
- q. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD;
- r. pelaksanaan pengesahaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- s. pelaksanaan pengesahaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- v. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD;

- w. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan;
- x. pelaksanaan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan;
- y. pelaksanaan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

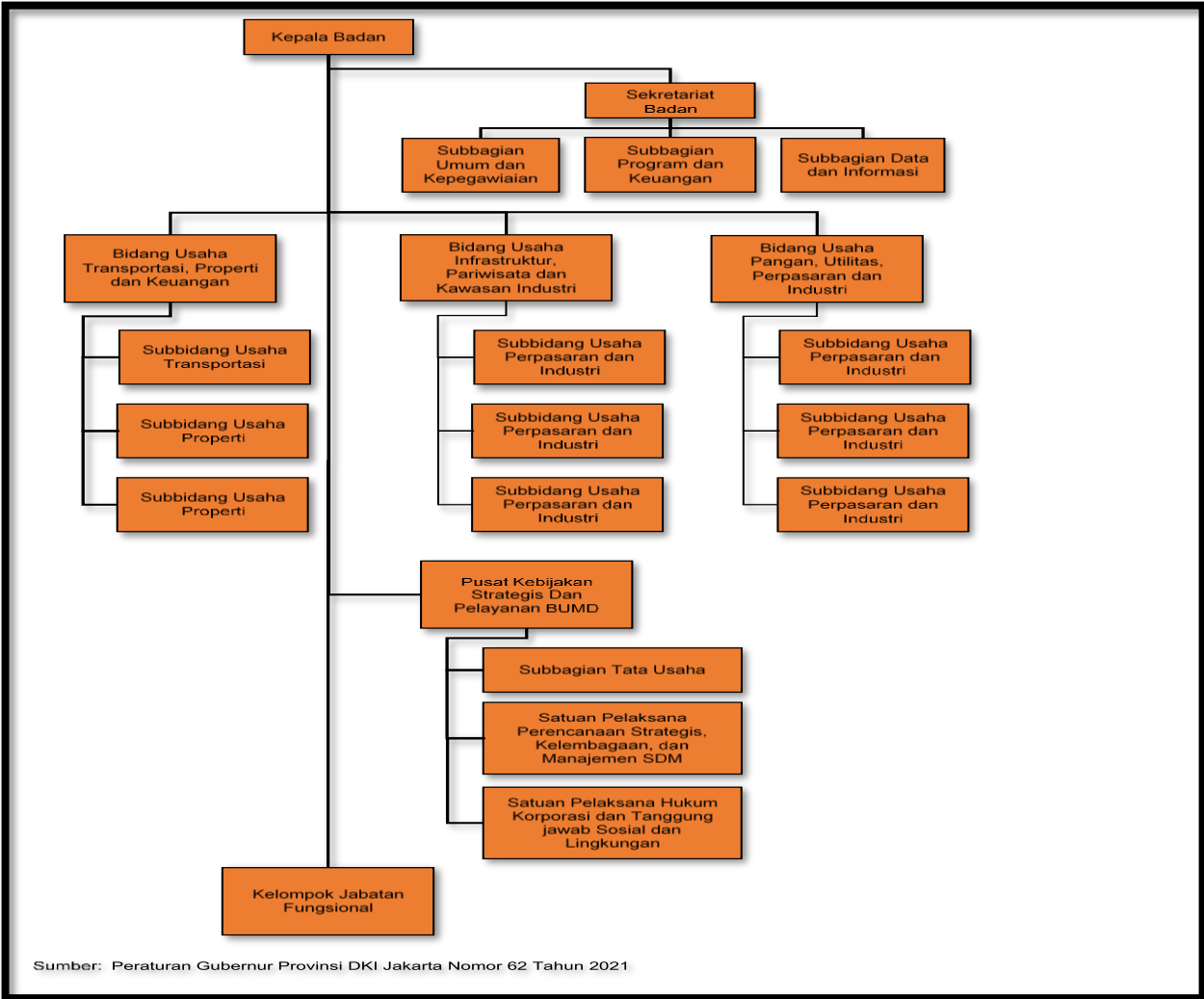
1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, susunan organisasi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - c. Subbagian Data dan Informasi.
3. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan terdiri dari :
 - a. Subbidang Usaha Transportasi;
 - b. Subbidang Usaha Properti; dan
 - c. Subbidang Usaha Keuangan.
4. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri terdiri dari:
 - a. Subbidang Usaha Infrastruktur;
 - b. Subbidang Usaha Pariwisata; dan
 - c. Subbidang Usaha Kawasan Industri.

- 5. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri terdiri dari :
 - a. Subbidang Usaha Pangan;
 - b. Subbidang Usaha Utilitas; dan
 - c. Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri.
- 6. Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, terdiri dari
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan, dan Manajemen SDM; dan
 - c. Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

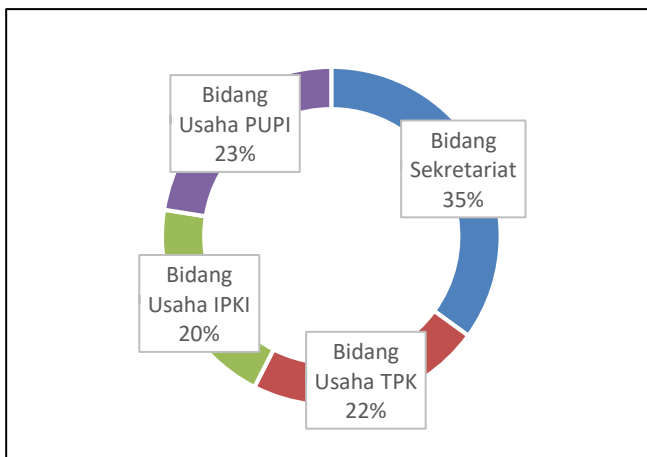


Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021

1.6. Sumber Daya Manusia

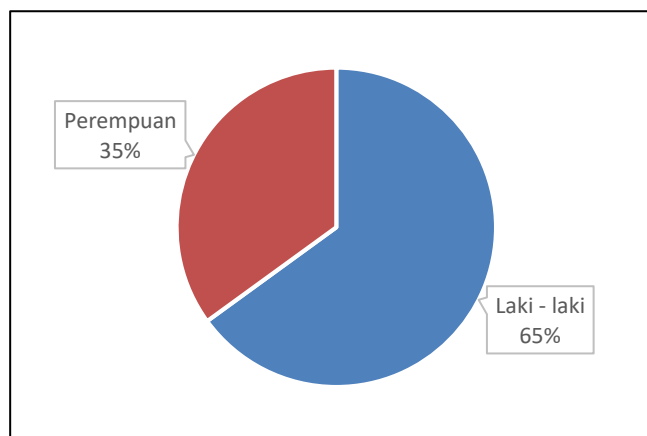
Jumlah pegawai Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 40 orang dengan sebaran penugasan sebagai berikut:

A. Berdasarkan Unit Kerja



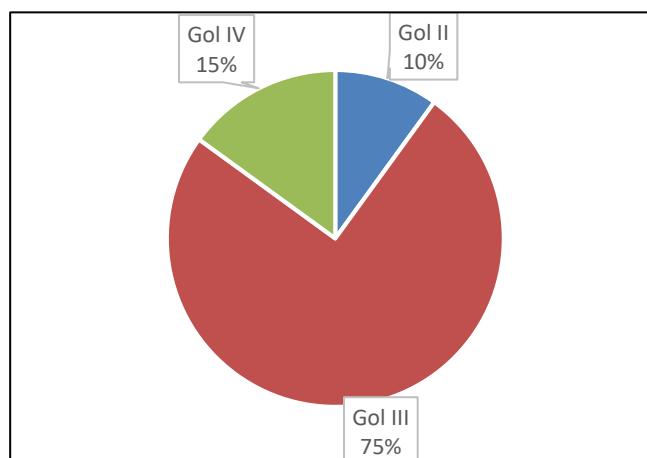
Jumlah Pegawai per Bidang:
1. Sekretariat: 14 Orang
2. TPK : 9 Orang
3. IPKI : 8 Orang
4. PUPI : 9 Orang

B. Berdasarkan Jenis Kelamin



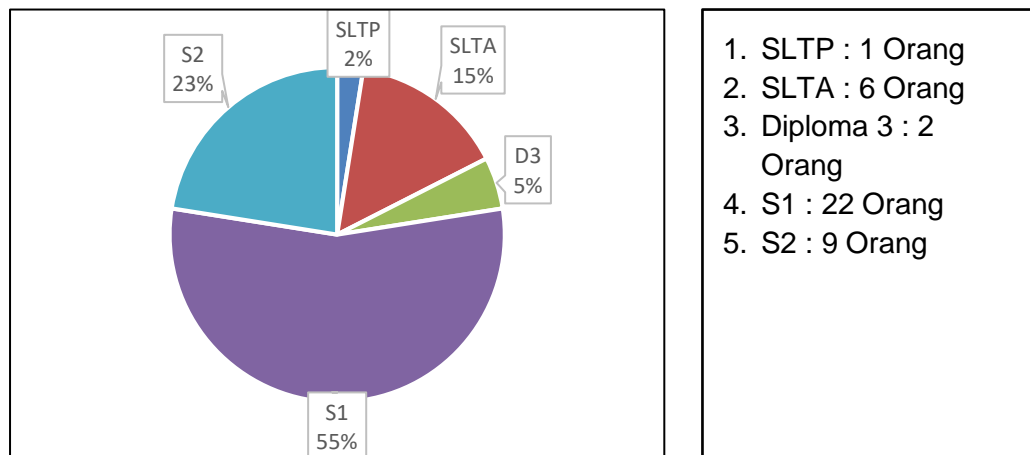
1. Laki – laki : 26 Orang
2. Perempuan : 14 Orang

C. Berdasarkan Pangkat Golongan



1. Golongan II : 4 Orang
2. Golongan III : 30 Orang
3. Golongan IV : 6 Orang

D. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah pegawai Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam penyelenggaraan pembinaan BUMD. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan menambah Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP) sebanyak 8 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2021

2.1. Rencana Strategis

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Perencanaan Kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 yang merupakan SKPD dengan Urusan Bidang Keuangan Sub Bidang pembinaan BUMD. Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022.

Dengan demikian perencanaan kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 merupakan penjabaran teknis dari Visi dan Misi Gubernur yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Gubernur Tahun 2017 - 2022. Berikut adalah Visi dan Misi Gubernur maupun Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Visi dan Misi setiap Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada Visi dan Misi Gubernur. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta maka Visi dan Misi Gubernur adalah sebagai berikut:

1) Visi Gubernur

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

2) Misi Gubernur

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap instansi wajib mengeluarkan Perjanjian Kinerja pada setiap awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah;
2. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk itu, di awal tahun 2021, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2021.

Sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis

Tabel 2.2.a Target Indikator Sasaran Strategis

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	94	Triliun
2	Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta.	1	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	77%	Persentase
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persentase

B. Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Tabel 2.2.b Target Indikator Sasaran Strategis (Kegiatan Strategis Daerah)

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (nomor 10)	100%	Persentase
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (nomor 21)	100%	Persentase
6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	Persentase
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	100%	Persentase
9	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	Persentase

C. Sasaran Khusus

Tabel 2.2.c Target Indikator Sasaran Khusus

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN KHUSUS					
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
		2	Persentase Pemanfaatan E-Order oleh BUMD	50%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	WTP
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	A (81)	Predikat
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	92	Nilai
17	Terwujudnya pembangunan infrastruktur penugasan oleh BUMD yang dibiayai melalui Pinjaman PEN		Persentase penyerapan anggaran PEN yang diberikan kepada BUMD	100%	Persentase

D. Sasaran Operasional

Tabel 2.2.d Target Indikator Sasaran Operasional

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SASARAN OPERASIONAL					
18	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
19	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persentase
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

Dalam mewujudkan target tersebut, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang pada awal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp31.521.571.741,-, Namun demikian pada tahun 2021 akibat pandemic Covid-19 anggaran kegiatan di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami pergeseran anggaran sebanyak 4 kali sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sehingga berubah menjadi Rp23.060.887.584,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.e Anggaran Badan Pembinaan BUMD Tahun 2021

No	Program	2021		Keterangan
		Penetapan	Perubahan	
1	Perekonomian dan Pembangunan	5.756.073.399	2.070.172.260	APBD
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25.765.498.342	20.990.715.324	APBD
	TOTAL	31.521.571.741	23.060.887.584	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, tugas pokok dan fungsi utama Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan pembinaan terhadap BUMD yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BP BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Perjanjian Kinerja 2021

Target capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana telah tertuang di dalam perjanjian kinerja Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 terdiri dari beberapa sasaran yaitu sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional.

Realisasi pencapaian indikator sasaran Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta yang di laporkan sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Tabel 3.1.a Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	94	98,59	104,88
2	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	77	67	87,01
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	95,42	104,85

a. Realisasi Nilai Investasi

Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di Provinsi DKI Jakarta yang datanya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam memperoleh data capaian Realisasi Investasi adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta.

b. Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat

Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu indikator penting dalam proses evaluasi kinerja pembinaan dan pengembangan BUMD, dimana tujuan akhirnya adalah peningkatan tingkat kesehatan BUMD. Capaian indikator persentase BUMD yang masuk kategori sehat diperoleh dari laporan evaluasi kinerja dari masing-masing BUMD, dimana indikator yang dinilai adalah aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Capaian kinerja persentase BUMD yang masuk kategori sehat pada Tahun 2021 adalah sebanyak 10 BUMD dari target sebanyak 15 BUMD atau tercapai sebesar 67% atau 87,01% dari target.

Tabel 3.1.b Data Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2021

NO	NAMA BUMD	OPINI	TINGKAT KESEHATAN
1	PD AM Jaya	WTP	SEHAT
2	PD Dharma Jaya	WTP	KURANG SEHAT (BBB)
3	Perumda Pasar Jaya	WTP	SEHAT (A)
4	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	WTP	KURANG SEHAT
5	PD PAL Jaya	WTP	SEHAT (A)
6	PT Food Station Tjipinang Jaya	WTP	SEHAT (AA)
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	WTP	KURANG SEHAT
8	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	WTP	KURANG SEHAT (BB)
9	PT Bank DKI	WTP	SEHAT (2)
10	PT Jakarta Tourisindo	WTP	SEHAT
11	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda)	WTP	SEHAT
12	PT Transportasi Jakarta	WTP	SEHAT (AA)
13	PT Jamkrida Jakarta	WTP	SEHAT
14	PT. JIEP	WTP	SEHAT
15	PT. KBN	WTP	KURANG SEHAT

Faktor – faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi adalah:

- Pelaksanaan pengkajian dan pendampingan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD secara berkala.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Direksi BUMD secara berkala.
- Tersedianya sistem informasi BUMD yang memudahkan rekapitulasi perolehan data kinerja BUMD.

Faktor penghambat keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi adalah:

- Tidak maksimalnya pencapaian target indikator tersebut dikarenakan dampak dari pandemi covid 19 yang maningkat pada triwulan I dan II tahun 2021, sehingga mengakibatkan

turunnya performa bisnis BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMD.

c. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 95,42% atau 104,85% dari target. Keberhasilan indikator tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan seluruh elemen pelaksana kegiatan serta penetapan target output pekerjaan dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan organisasi sehingga dijalankan secara efektif dan efisien.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator tersebut diatas adalah Program Perekonomian dan Pembangunan. Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.2.070.172.260,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.813.870.000,- atau 87,62%.

Program perekonomian dan pembangunan memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD serta sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka

Usaha yang terdiri dari 4 (empat) Rincian Sub Kegiatan, yaitu:

- Penyusunan Analisis Kebijakan Strategis Pengembangan BUMD.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi BUMD (SI BUMD).
- Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Calon Pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan.
- Penyusunan Analisis Kebijakan Strategis Pembinaan BUMD.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Tabel 3.1.c Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (KSD)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (nomor 10)	%	100	100	100%
2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	%	100	100	100%
3	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	%	100	100	100%
4	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	%	100	100	100%
5	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	%	100	100	100%
6	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	%	100	100	100%
7	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	%	100	100	100%
8	Persentase capaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	%	100	100	100%
9	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	%	100	100	100%

Sasaran Khusus

Tabel 3.1.d Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Khusus

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemanfaatan E-Order	%	100	100	100%
2	Persentase Pemanfaatan E-Order oleh BUMD	%	50	71,6	143,2%
3	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3	3	100%
4	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	%	100	100	100%
5	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	Nilai	81	90,41	111,62
6	Nilai PMPRB	Nilai	92	89,81	97,61%
7	Prosentase penyerapan anggaran PEN yang diberikan kepada BUMD	%	100	100	100

Dari data capaian indikator kinerja sasaran khusus diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian pada indikator sasaran khusus lebih dari 100%, hal ini dikarenakan penetapan target dilakukan secara cermat dan sesuai kebutuhan organisasi sehingga dijalankan secara efektif dan efisien.

Sasaran Operasional

Tabel 3.1.e Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Operasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	100	100	100%
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100%
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	100	100	100%

Dari data capaian indikator kinerja sasaran khusus diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian pada indikator sasaran operasional adalah 100%, hal ini dikarenakan pelaksanaan indikator dimonitor dan dievaluasi secara berkala dengan seluruh elemen pelaksana indikator.

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Pencapaian kinerja Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kejadian luar biasa dimana wabah pandemic covid 19 meningkat. Sehingga mengakibatkan turunnya performa bisnis perusahaan yang berdampak terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.f Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Ket
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	100,2	110	94	101,09	91.58	98,59	
2	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	N/A	N/A	77	87	80	67	
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	N/A	100	91	N/A	100	95,42	

Dari data capaian diatas untuk indikator kinerja Persentase BUMD yang masuk kategori sehat pada tahun 2019 dan 2020 tidak memiliki target dikarenakan tidak masuk pada indikator kinerja sasaran, namun jika dilihat pada dokumen perubahan Renstra Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 indikator tersebut pada tahun 2019 dan 2020 memiliki target 85% dan 80%.

Tabel 3.1.g Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Khusus

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Ket
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Persentase Pemanfaatan E-Order	%	N/A	30	100	N/A	30	100	
2	Persentase Pemanfaatan E-Order oleh BUMD	%	N/A	N/A	50	N/A	N/A	67	
3	Opini laporan keuangan daerah	WTP	N/A	3	3	N/A	3	3	
4	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	%	N/A	100	100	N/A	100	100	
5	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020	Nilai	N/A	N/A	81	N/A	N/A	90,41	
6	Nilai PMPRB	Nilai	N/A	N/A	92	N/A	N/A	89,81	
7	Prosentase penyerapan anggaran PEN yang diberikan kepada BUMD	%	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	

Tabel 3.1.h Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Operasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Ket
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	%	N/A	100	100	N/A	100	100	
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	100	100	N/A	100	100	
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	%	N/A	100	100	N/A	100	100	

3. Perbandingan pencapaian kinerja dengan target RPJMD 2017-2022

Target pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 untuk indikator realisasi nilai investasi adalah sebesar 94 Triliun Rupiah. Target tersebut sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi Indonesia khususnya DKI Jakarta yang masih berdampak karena adanya pandemic covid 19 yang di Tahun 2021 semakin meningkat.

Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi kinerja yang digambarkan oleh realisasi nilai investasi adalah sebesar 98,59 Triliun Rupiah atau 104,88%.

Tercapainya target indikator realisasi nilai investasi disebabkan karena penetapan target indikator dilakukan secara cermat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dijalankan secara efektif dan efisien.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 memiliki indikator sasaran strategis yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Analisa terkait efisiensi penggunaan sumber daya terhadap indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.i Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	104,88	87,62	12,38
2	Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta.	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	87,01	87,62	12,38
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	104,85	90,71	9,29

Dari data capaian di atas dapat dilihat untuk indikator sasaran realisasi nilai investasi dan Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat didukung oleh anggaran program yang sama, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan dengan efisiensi anggaran sebesar 12,38%. Efisiensi anggaran program dikarenakan adanya pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Calon Pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan, sehingga pelaksanaan pekerjaannya tidak bisa di prediksi sampai akhir tahun 2021.

Sedangkan untuk indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggunakan program Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi dengan efisiensi anggaran sebesar 9,29%. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.j Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2021			Capaian %	Program	pagu	realisasi	capaian
			satuan	target	Realisasi					
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rupiah	94	98,59	104,88	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62%
2	Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta.	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	%	77	67	87,01				
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	91	95,42	104,85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.990.715.324	19.041.211.396	90,71%

5. Perbandingan pencapaian kinerja dengan target Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024, target Nilai Realisasi Investasi Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta adalah 103,8 Triliun Rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 98,59 Triliun Rupiah atau 94,98%.

Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan dampak dari pandemic covid 19 yang mengakibatkan turunnya performa bisnis di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2021

Pada tahun 2021 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) program dengan rincian 1 (satu) program utama dan 1 (satu) program bersama. Rincian program sebagaimana dimaksud adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dari sejumlah program tersebut dijabarkan ke dalam 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan dalam penetapan APBD Murni 2021, Namun demikian pada tahun 2021 akibat pandemic Covid-19 anggaran kegiatan di seluruh SKPD Pemprov DKI Jakarta mengalami pergeseran anggaran sebanyak 4 kali sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pergeseran anggaran dilakukan dalam rangka mengalokasikan kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dan Jaring pengaman social bagi masyarakat yang kurang mampu.

Rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.k Kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN	PERUBAHAN
4.01.06 Program Perekonomian dan Pembangunan			
1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	5.756.073.399	2.070.172.260
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5.756.073.399	2.070.172.260
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.620.808.370	20.188.578.124
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.611.812.570	20.179.582.324
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.995.800	8.995.800
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.955.222	198.913.020
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.427.542	146.576.100
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.967.100	20.967.100
07	Penyediaan Bahan/Material	16.877.000	9.644.000
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	116.683.580	21.725.820
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.659.374	58.148.804

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
		PENETAPAN	PERUBAHAN
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.253.254	58.148.804
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.406.120	-

Capaian realisasi program dan kegiatan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mencapai sasaran kontribusi deviden sebesar 660 Miliar Rupiah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.070.172.260,- (dua miliar tujuh puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi indikator program adalah sebesar 398,7 Miliar Rupiah atau 60,41% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.813.870.000,- atau 87,62%.

Tidak maksimalnya pencapaian target indikator tersebut dikarenakan dampak dari pandemi covid 19 yang meningkat pada triwulan I dan II tahun 2021, sehingga mengakibatkan turunnya performa bisnis BUMD yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMD. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha memiliki 4 indikator sub kegiatan yaitu:

- a. Jumlah calon pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan yang terseleksi yang memiliki target sebanyak 30 Orang.

Sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan Seleksi Calon Pengurus BUMD dengan jumlah peserta yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan dalam rangka pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus

BUMD sebanyak 34 Orang, sehingga capaian indikator ini mencapai 113%.

- b. Jumlah laporan kinerja Tenaga Ahli dalam pengelolaan dan pengembangan SI BUMD yang memiliki target sebanyak 28 laporan. Pada tahun 2021 selain dilakukan perawatan system informasi BUMD dengan dibantu oleh tenaga ahli selama 12 bulan pekerjaan ini juga melakukan pembaharuan sistem yang terdiri dari:

- Form Monitoring Realisasi KPI dan penggunaan PMD;
- Fitur Validasi Input Data oleh Direksi BUMD;
- Fitur Notifikasi Pengurus BUMD yang akan Berakhir Masa Jabatan;
- Integrasi Data PT Bank DKI, PT. Jamkrida Jakarta dan PD. AM Jaya; dan
- Fitur Informasi Kinerja Keuangan BUMD di Website.

Sampai dengan akhir tahun 2021 sudah menghasilkan laporan sebanyak 28 buah, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100%.

- c. Jumlah dokumen analisa kebijakan strategis pengembangan BUMD yang tersusun yang memiliki target sebanyak 14 dokumen.

Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan pekerjaan penyediaan analisis investasi untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada BUMD serta menghasilkan dokumen sebanyak 14 buah, sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100%. Pekerjaan ini terdiri dari Penyusunan analisis investasi untuk PMD pada Penyusunan APBD Tahun 2022 dan Penyusunan analisis investasi untuk PMD pada Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2021.

- d. Jumlah dokumen analisis kebijakan strategis pembinaan BUMD yang tersusun yang memiliki target sebanyak 5 dokumen.

Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan 5 (lima) kajian/kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan BUMD, sehingga capaian dari indikator ini adalah sebesar 100%. Kajian yang telah dihasilkan selama tahun 2021 terdiri dari:

- Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan BUMD.
- Kajian tentang konsep optimalisasi BUMD Transportasi dan Anak Usaha/ Perusahaan Patungan.

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Migas (perseroda) (Tenaga Ahli Ekonomi).
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Migas (perseroda) (Tenaga Ahli Hukum).
- Penyusunan kajian akademis pembentukan UPT Pusat Analisis Kebijakan Strategis.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mencapai sasaran Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 4 indeks dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.990.715.324,- (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi indikator program ini adalah sebesar 4 indeks atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.19.041.211.396,- atau 90,71%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.20.188.578.124,- dengan penyerapan sebesar Rp.18.286.051.939,- atau 90,58%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki indikator sub kegiatan Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100% dan alokasi anggaran sebesar Rp20.179.582.324,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.18.279.415.939,- atau 90,58%.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki indikator sub kegiatan Nilai kepuasan layanan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp8.995.800,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.636.000,- atau 73,77%.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.198.913.020,- dengan penyerapan sebesar

Rp.182.463.015,- atau 91,73%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki 2 (dua) indikator sub kegiatan yaitu Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 4 Nilai dan Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor dengan target 4 Nilai dengan alokasi anggaran sebesar Rp146.576.100,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah 4 Nilai atau 100% dan Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.141.844.615,- atau 96,77%.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki indikator sub kegiatan Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp20.967.100,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.20.570.000,- atau 98,11%.
 - Penyediaan Bahan/Material memiliki indikator sub kegiatan Nilai Kepuasan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp9.644.000,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.9.644.000,- atau 100%.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu memiliki indikator sub kegiatan Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp21.725.820,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.10.404.400,- atau 47,89%.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.545.075.376,- dengan

penyerapan sebesar Rp.539.611.499,- atau 99%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki indikator sub kegiatan Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp74.923.200,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.73.128.000,- atau 97,6%.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memiliki indikator sub kegiatan Jumlah laporan kinerja petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan dengan target 96 laporan dan alokasi anggaran sebesar Rp470.152.176,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.466.483.499,- atau 99,22%.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.58.148.804,- dengan penyerapan sebesar Rp.33.084.943,- atau 56,9%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas memiliki indikator sub kegiatan Nilai Kepuasan Layanan Perizinan dan Pemeliharaan KDO/KDO Khusus dengan target 4 Nilai dan alokasi anggaran sebesar Rp58.148.804,-. Sampai akhir tahun 2021 realisasi indikator sub kegiatan ini adalah 4 Nilai atau 100% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.33.084.943,- atau 56,9%.

3.2. Realisasi Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2021, pagu dan capaian realisasi anggaran secara total adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.a Realisasi Penyerapan Anggaran

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Belanja Operasi	23.060.887.584	20.855.081.396	90,43	
	a. Belanja Pegawai	20.179.582.324	18.279.415.939	90,58	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.881.305.260	2.575.665.457	89,39	
2	Belanja Modal	0	0	0	
	Total (1 + 2)	23.060.887.584	20.855.081.396	90,43	

Dari tabel diatas dapat dilihat sampai dengan akhir tahun 2021 penyerapan anggaran Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencapai 90,43% dimana terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Pegawai mencapai 90,58%, hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai sampai akhir tahun 2021 yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran belanja pegawai.

Sedangkan realisasi penyerapan untuk belanja barang dan jasa mencapai 89,39%. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran disebabkan karena terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang memiliki capaian dibawah 60%, yaitu Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan penyerapan sebesar 47,89% dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan penyerapan sebesar 56,9%, hal ini disebabkan karena dampak dari pandemic covid 19 dimana pelaksanaan rapat hampir seluruhnya dilakukan dengan daring (*online*) menggunakan aplikasi *online meeting* serta berkurangnya mobilitas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Kendaraan Dinas Operasional (KDO).

Sementara untuk setiap program di lingkungan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.b Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian
			(Rp)	(%)
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.990.715.324	19.041.211.396	90,71
Jumlah		23.060.887.584	20.855.081.396	90,43

Tabel 3.2.c Realisasi Penyerapan Anggaran per Kegiatan dan Sub Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	%
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62
1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.990.715.324	19.041.211.396	90,71
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.188.578.124	18.286.051.939	90,58
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.179.582.324	18.279.415.939	90,58
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.995.800	6.636.000	73,77
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.913.020	182.463.015	91,73
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.576.100	141.844.615	96,77
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.967.100	20.570.000	98,11
07	Penyediaan Bahan/Material	9.644.000	9.644.000	100
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.725.820	10.404.400	47,89
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.075.376	539.611.499	99
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.923.200	73.128.000	97,60
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	470.152.176	466.483.499	99,22

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	%
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.148.804	33.084.943	56,9
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.148.804	33.084.943	56,9
	TOTAL	23.060.887.584	20.855.081.396	90,43

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKIP merupakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mencakup data dan informasi rencana target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, rencana dan realisasi penggunaan anggaran dan kegiatan dan analisis terhadap capain kinerja, serta kendala/permasalahan yang dihadapi berikut upaya penanggulangannya selama tahun 2021.

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2021 Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta menetapkan 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja sasaran yang

dalam proses pencapaiannya didukung oleh APBD. Total anggaran yang secara langsung menunjang pencapaian kinerja tahun 2021 sebesar Rp.23.060.887.584,- dengan realisasi pencapaian sebesar Rp.20.855.081.396,-.

Pencapaian target indikator kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan investasi adalah Realisasi Nilai Investasi dengan target 94 Triliun Rupiah terealisasi sebesar 98,59 Triliun Rupiah, Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat dengan target 77% terealisasi sebesar 67%, dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target 91% terealisasi sebesar 95,42%.

4.2. Saran

Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan agar pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang dapat mencerminkan kinerja yang lebih baik :

1. Memperhatikan pelaksanaan kinerja tahun 2021 yang dipengaruhi oleh situasi diluar kendali yaitu pandemic Covid-19 disarankan dalam penyusunan rencana kinerja tahun mendatang dapat mempertimbangkan kondisi tersebut;
2. Proses penetapan target kinerja dilakukan dengan prinsip realistis dan terukur;
3. Proses pencapaian target perlu di kontrol melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meminimalisasi setiap hambatan yang dapat mengganggu target capaian kinerja.

Demikian LKIP BP BUMD Provinsi DKI Jakarta ini disajikan, semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja BP BUMD Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

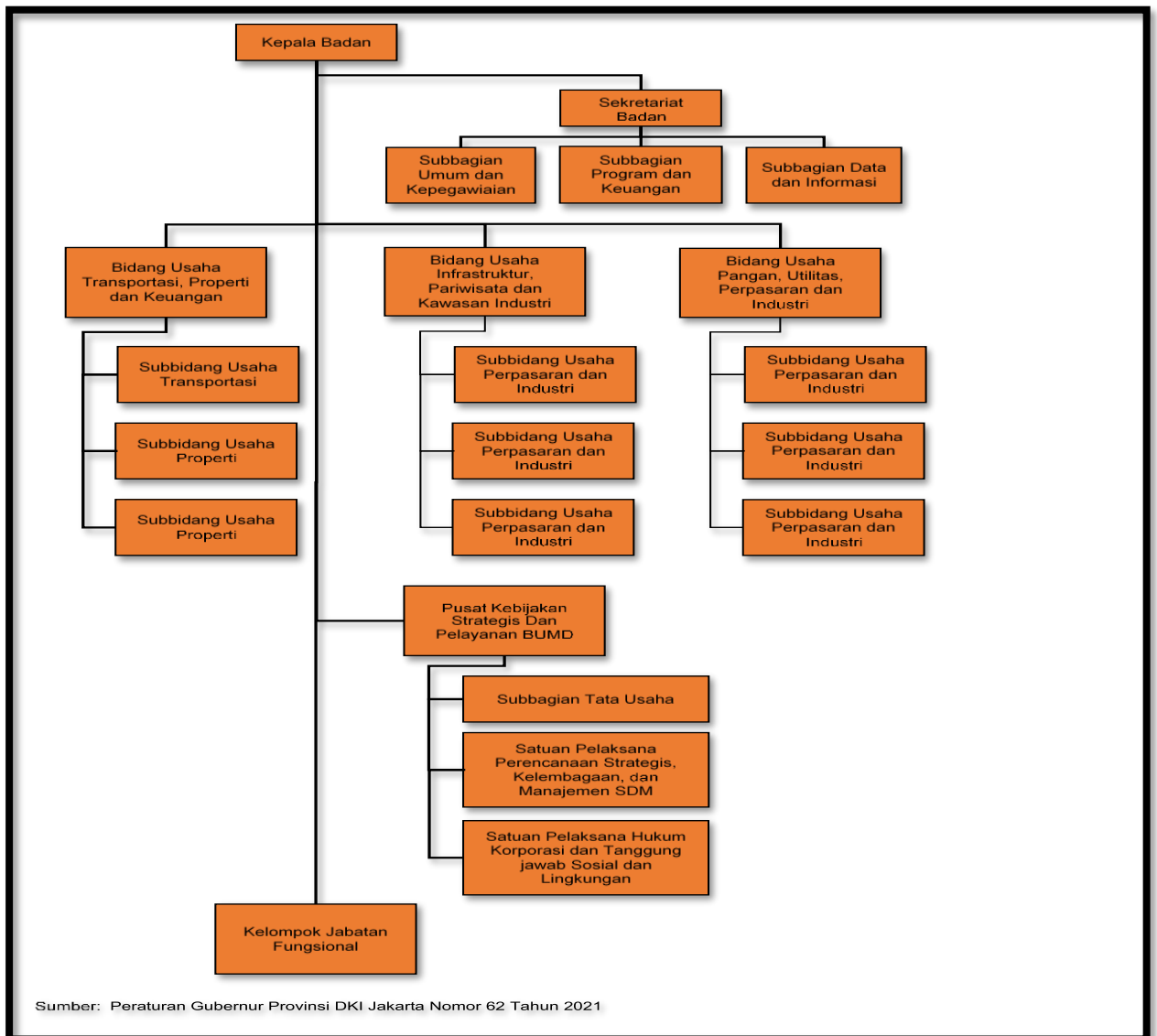
Lampiran – Lampiran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Lampiran 1 : Bagan Struktur BP BUMD Prov. DKI Jakarta

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Keterangan:**

- 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016;
- 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 62 Tahun 2021.

**BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 53 Tahun 2014**

**BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIYADI
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

RIYADI
NIP 196402201998031000

Lampiran 3 : Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2021

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 53 Tahun 2014**

**BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Riyadi
 NIP : 196402201998031004
 Jabatan : Plt. Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	e-SAKIP	Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.	5	32	75	94	94	Triliun
2	Mewujudkan Peran dan Kontribusi BUMD yang optimal kepada Peningkatan nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta.	1	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat	e-SAKIP	Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat (operasional, keuangan dan administrasi) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja tahunan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Negara atau Kantor Akuntan Publik (KAP)	N/A	N/A	N/A	77%	77%	Persentase
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = $(\text{Persentase Serapan Anggaran} \times 40\%)$. Anggaran yang dipertanggungjawabkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil Inputan PDUNPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\text{Efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) - (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persentase
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Betarraf Internasional (nomor 10)	e-Monev/KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Betarraf Internasional (nomor 10)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (nomor 21)	e-Monev/KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih (nomor 21)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase

6	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Stu/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Stu/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi (ramah lingkungan, dan terjangkau) bagi semua warga Jakarta	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 23)	100%	100%	100%	100%	Persentase
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (nomor 41)	100%	100%	N/A	100%	Persentase
9	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS										
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order per triwulan dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase Pemanfaatan E-Order oleh BUMD	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman oleh BUMD yang memanfaatkan e-order per triwulan dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman oleh BUMD x 100%	50%	50%	50%	50%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3 (WTP)	N/A	3 (WTP)	WTP

14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfoitk menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfoitk.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Pertimbangan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
15	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoral (nilai: 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat	
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMPRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikordinasikan oleh Inspektoral dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
17	Tenwujudnya pembangunan infrastruktur perugasan oleh BUMD yang dibiayai melalui Pinjaman PEN	1	Persentase penyerapan anggaran PEN yang diberikan kepada BUMD	e-Kinerja	Jumlah Rupiah percairan dana PEN yang diterima BUMD dibagi dengan realisasi penyerapan Dana PEN pada BUMD x 100%	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase	
SASARAN OPERASIONAL												
18	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi T. Arahan Gubernur (lapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah T. Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	
19	Meningkatnya penyelesaian gangguan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian gangguan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi T. Aduan Masyarakat / Jumlah T. Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase	

20	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / Jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	100%	Persentase
----	--	---	---	-----------	---	-----	-----	-----	------	------------

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Pit. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Rhyadi
NIP. 196402201998031004